



RESPONS STRATEJIK APIP PASCA PANDEMI COVID 19

DR Binsar H Simanjuntak Ak MBA CPMA CA Cipsas QIA QGIA

**Staf Khusus Menteri PUPR
Komite Audit Kementerian PUPR
Ketua Dewan Eksekutif DS-QGIA**

Disampaikan pada:

WEBINAR

**Penguatan Kapabilitas Auditor Internal Pemerintah Pasca Pandemi Covid-19
Melalui Sertifikasi QGIA**

Jakarta, 20 Februari 2022

YAYASAN PENDIDIKAN INTERNAL AUDIT

OUTLINE

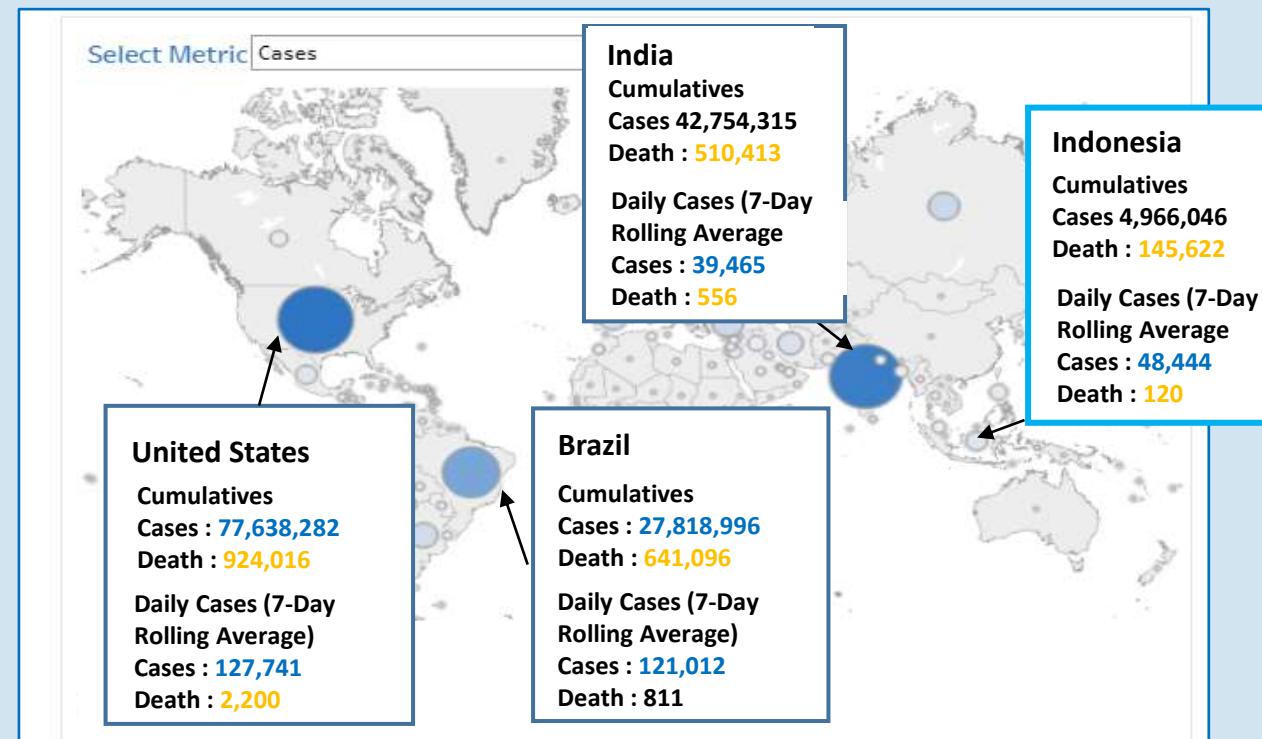
- 1 *DAMPAK PANDEMI PADA K/L/D***
- 2 *ARAHAN PRESIDEN MENGHADAPI PANDEMI***
- 3 *DISRUPSI ERA PANDEMI COVID-19***
- 4 *YANG HARUS DILAKUKAN PROFESI AUDITOR INTERN PEMERINTAH UNTUK BERADAPTASI
(das sollen - what should be)***
- 5 *CONTOH KASUS: BEBERAPA RESPON APIP KEMENTERIAN PUPR MENGHADAPI PERUBAHAN
(das sein - what is)***
- 6 *WHAT NEXT FOR APIP
(leadership in governance, risk and control)***

A photograph showing several business people in suits working at a desk. One person is pointing at a laptop screen, another is writing in a notebook, and others are visible in the background. The scene suggests a professional office environment focused on work and analysis.

1

DAMPAK PANDEMI PADA K/L/D

PANDEMI COVID-19 GLOBAL

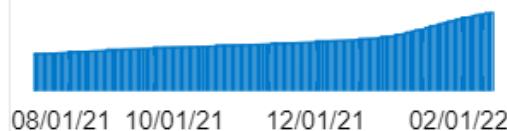


COVID-19: Cases and Deaths as of February 16, 2022

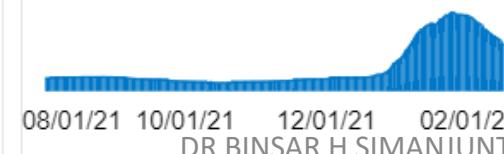
KFF

Kaiser Family Foundation

Cumulative Cases
417,731,946



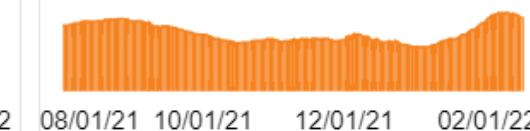
7-Day Rolling Average
2,534,830



Cumulative Deaths
5,850,626

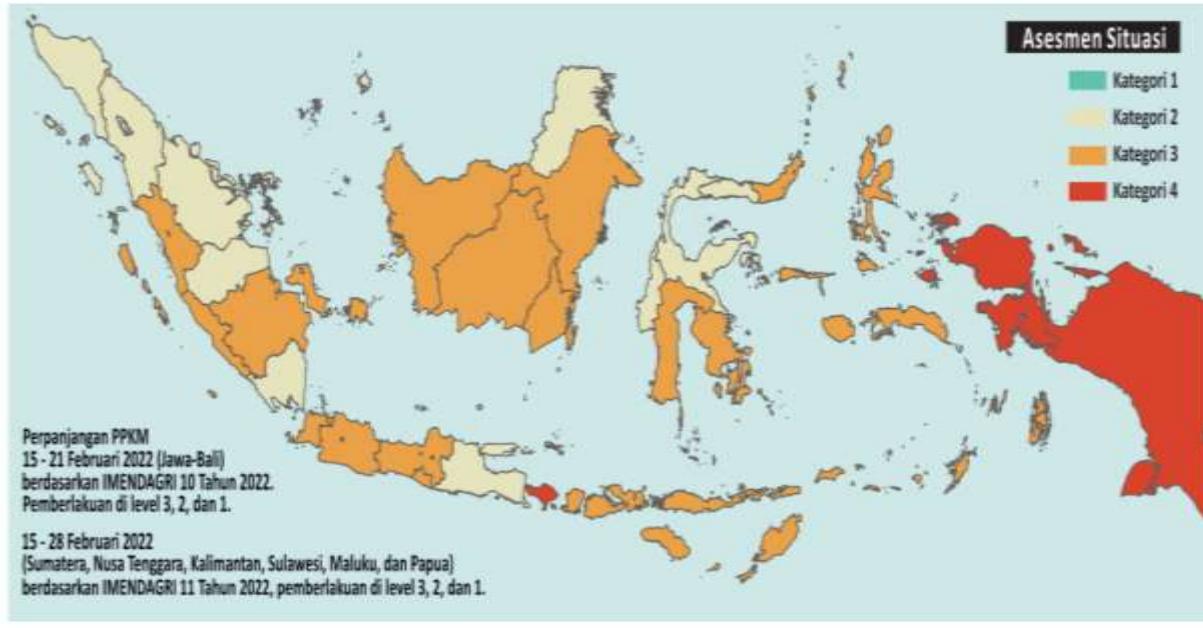


7-Day Rolling Average
13,368



PANDEMI COVID-19 INDONESIA

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)



Tren Pertambahan Kasus Konfirmasi, Sembuh dan Meninggal di Indonesia



<https://www.kemkes.go.id/article/view/20012900002/Kesiapsiagaan-menghadapi-Infeksi-Novel-Coronavirus.html>

<https://www.kemkes.go.id/article/view/20012900002/Kesiapsiagaan-menghadapi-Infeksi-Novel-Coronavirus.html>

INDONESIA

COVID 19

#Update 18 Feb 2022 10.00

(Sumber : PHEOC Kemkes RI)

5.030.002

KASUS KONFIRMASI (+63.956)

4.414.306

KASUS SEMBUH (87,8%)

145.828

KASUS MENINGGAL (2,9%)

469.868

KASUS AKTIF (9,3%)

KONDISI PANDEMI COVID-19 SAMPAI SAAT INI



Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di seluruh dunia terus menunjukkan peningkatan, dan telah menimbulkan korban jiwa, serta kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat

IMPLIKASI

- **Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi Nasional,**
- **Penurunan Penerimaan Negara,**
- **Peningkatan Belanja Negara, & Pembiayaan,**
- **Fokus pada Belanja untuk Kesehatan, Jaring Pengaman Sosial (*social safety net*),**
- **Pemulihan Perekonominan,**
- **Tindakan Antisipasi (*forward looking*) dalam rangka Menjaga Stabilitas Sektor Keuangan.**

DAMPAK PANDEMI COVID 19



- Semakin besarnya risiko yang dihadapi K/L dan Pemda
- Pelaksanaan pekerjaan yang terdampak dengan berbagai pembatasan fisik di lapangan. Di sisi lain, pekerjaan harus dilaksanakan dan diselesaikan segera
- Keterbatasan anggaran, dan keterbatasan bahan baku, serta keterbatasan SDM yang berkompeten mempersulit penyelesaian pekerjaan secara tepat waktu
- Tuntutan dan kebutuhan masyarakat terutama yang terkena secara langsung dampak pandemi memerlukan penanganan segera

A professional photograph showing several people in business attire (suits and ties) gathered around a desk. They are focused on documents and a laptop, with one person's hands clearly visible holding a pen over a sheet of paper. The scene conveys a sense of teamwork and work in progress.

2

ARAHAH PRESIDEN MENGHADAPI PANDEMI

BEBERAPA KEBIJAKAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

1

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang

2

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19

3

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Penanganan Pandemi Covid-19

4

PMK Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiasaan UMKM dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

ARAHAN PRESIDEN RI

RAKORNAS PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

15 JUNI 2020

1. Langkah yang Cepat, Tepat, Akuntabel untuk Kelola Dana Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar Rp677,2 triliun.
2. Tata Kelolanya harus Baik, Sasarannya harus Tepat, Prosedurnya harus Sederhana dan Tidak Berbelit-belit.
3. *Output* dan *Outcome*-nya harus maksimal bagi kehidupan seluruh rakyat Indonesia.
4. Aspek pencegahan harus lebih dikedepankan. Harus lebih proaktif, jangan menunggu sampai terjadinya masalah. Kalau ada potensi masalah, segera ingatkan, jangan sampai pejabat dan aparat pemerintah dibiarkan terperosok, bangun sistem peringatan dini (*early warning system*), perkuat tata kelola yang baik, yang transparan, yang akuntabel.
5. Saya ingin tegaskan bahwa pemerintah tidak main-main dalam soal akuntabilitas. Pencegahan harus diutamakan, tata kelola yang baik harus didahulukan. Tetapi kalau ada yang masih membandel, kalau ada niat untuk korupsi, ada *mens rea*, maka silakan Bapak-Ibu, digigit dengan keras. Uang negara harus diselamatkan, kepercayaan rakyat harus terus kita jaga.
6. BPKP, Inspektorat, dan juga LKPP adalah aparat internal pemerintah, harus Fokus ke Pencegahan dan Perbaikan Tata Kelola.



Tiga Arahan Presiden Jokowi

**RAKORNAS PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
27 MEI 2021**

1

Terus melakukan serta meningkatkan **pengawalan dalam rangka percepatan belanja pemerintah** dan diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat untuk merealisasikan dan mempercepat belanja pemerintah.

2

Terus meningkatkan pengawasan terhadap kualitas perencanaan program,
Perencanaan program juga harus adaptif & dapat disesuaikan dengan situasi serta kondisi saat ini

3

Memberikan perhatian terhadap **peningkatan kualitas data** yang dikelola oleh pemerintah
Integrasi dan sinkronisasi basis data antarprogram perlu dikawal untuk meningkatkan keandalan data sehingga program-program yang dijalankan pemerintah dapat tepat sasaran



A background photograph showing several business professionals in suits working at a desk. One person is pointing at a document, another is writing, and others are visible in the background. A laptop is also on the desk.

3

DISRUPSI ERA PANDEMI COVID-19

DISRUPSI YANG DISEBABKAN BENCANA PANDEMI COVID 19



Perubahan dari pola tatap muka ke *online*

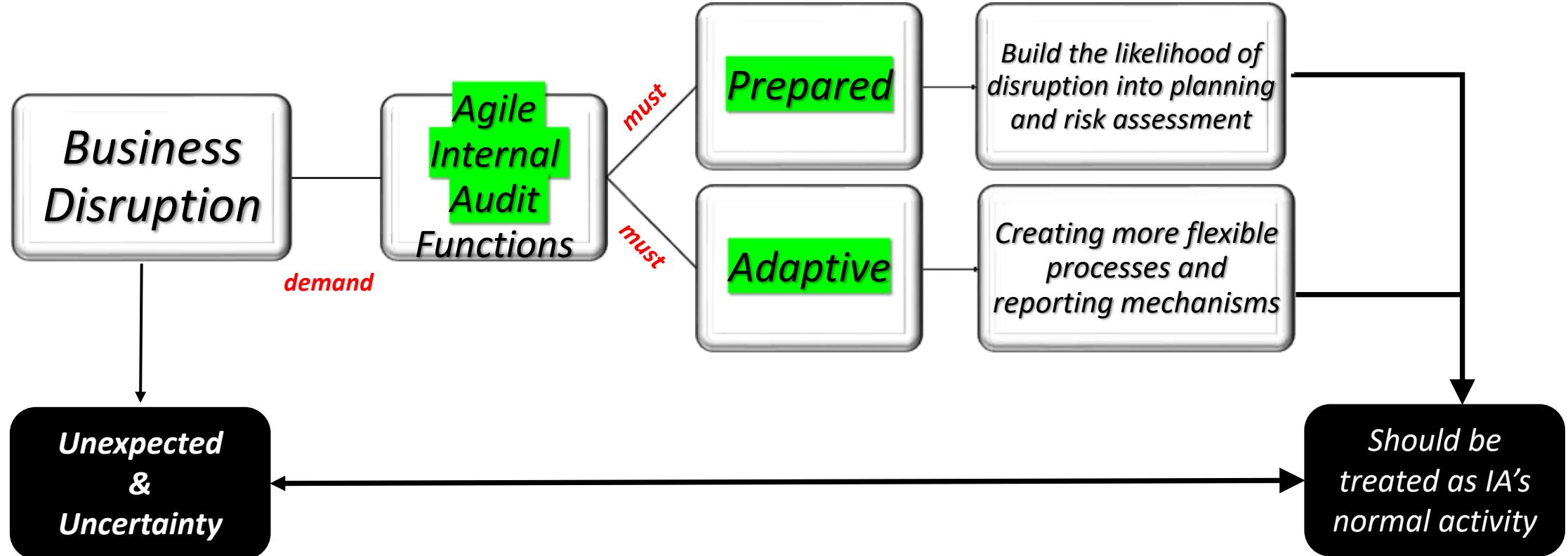




4

***YANG HARUS DILAKUKAN PROFESI
AUDITOR INTERN PEMERINTAH
UNTUK BERADAPTASI
(das sollen-what should be)***

Bagaimana *Internal Audit* Seharusnya Berperan?



Diolah dari: State of the Internal Audit Profession Study, 2017 (Pricewaterhouse Coopers)

Apa yang harus dilakukan profesi auditor intern pemerintah untuk beradaptasi dengan disrupti ini
(das sollen-what should be)



Agile Audit



Integrated IT systems



Shifting mindset to become trusted advisors



Use of digital tools such as CACM

5

CONTOH KASUS: BEBERAPA RESPONS APIP KEMENTERIAN PUPR MENGHADAPI PERUBAHAN

(das sein - what is)

Contoh kasus: Beberapa Respons APIP Kementerian PUPR dalam menghadapi perubahan (das sein-what is)

- Memperkuat **mitigasi risiko** dengan implementasi manajemen risiko pada seluruh Satker
- Menekankan pentingnya peran *first line* untuk **menjaga integritas dan keandalan proses bisnis** di level *first line*
- Membangun **unit kepatuhan intern** pada Unit Eselon I pusat
- **Me-redesign sistem PBJ** sehingga terdapat pemisahan fungsi antara PPK dan panitia pemilihan PBJ
- Memperkuat **kapabilitas APIP** sebagai *third line*
- Mengimplementasi **Komite Audit**
- Memperkuat sistem **CACM**

PENYESUAIAN CARA PENGAWASAN INTERN DI KEMENTERIAN PUPR

Mengedepankan ***Current Audit & Pendampingan (Consulting)***



**Pengurangan Waktu Pemeriksaan di Lapangan,
Pemanfaatan Teknologi Informasi:**

- a. Pengurangan Biaya Perjalanan Dinas melalui Pengawasan secara ***Teleconference***

mulai Tahun 2020 Inspektorat Jenderal telah melakukan pengawasan berbasis daring atau *hybrid* (*kombinasi check lapangan & online*)

- b. Klinik Konsultasi ***Online***
- c. Pengembangan ***CACM & eAudit***



PENGAWASAN PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 TA 2020 – 2021

Seluruh kegiatan penanggulangan pandemi covid-19 dilakukan pendampingan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR antara lain: Pembangunan Rumah Sakit/Pusat Isolasi dan Belanja Barang Penanggulangan Covid-19

Identifikasi Kerawanan dalam Pembangunan RS/Pusat Isolasi

a. Penentuan Jenis Kontrak

(Harga Satuan atau *Design & Build*)

b. Penentuan Lingkup & Jenis

Pekerjaan (Pemeriksaan 0%: Kementerian PUPR, Pemilik Aset, Penyedia Jasa)

c. Pemilihan Penyedia Jasa

(Dasar & Kriteria Penunjukan)

d. Kewajaran Harga

e. Dokumen Pendukung Pembayaran

f. Alih Guna/Serah Terima Aset

Pengawasan terhadap Pelaksanaan Penyiapan dan Pembangunan Infrastruktur Percepatan Penanggulangan Covid-19, TA 2020 antara lain di P. Galang (Kepulauan Riau), RS Darurat Wisma Atlet, Biak Numfor (Papua), Lamongan dan UGM (DIY)



Pendampingan ITJEN

PANDUAN TATA KELOLA & PENGENDALIAN TIAP TAHAPAN

Pendampingan Pengadaan
Barang/Jasa (sejak
perencanaan s.d. pemanfaatan)
untuk Penanggulangan Covid-19 di Kementerian PUPR

BPKP

PERMINTAAN
AUDIT
PEMBAYARAN

**PENGAWASAN KEGIATAN PENANGGULANGAN
BENCANA ALAM & DUKUNGAN PENANGGULANGAN
PANDEMI COVID-19
KEMENTERIAN PUPR TA 2020 - 2021**

**Pembangunan Infrastruktur
Penanggulangan Covid-19**

Dilaksanakan sejak Tahun 2020 diawali dengan
Pembangunan RS di Pulau Galang



**Penanggulangan Bencana Alam
di Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Nusa
Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan lokasi
lainnya**



A background photograph showing several business people in a meeting. One man in a blue suit is pointing at a document with a pen. Another man in a dark suit is looking down at the same document. A laptop keyboard is visible in the foreground.

6

WHAT NEXT FOR APIP

(leadership in governance, risk and control)

WHAT NEXT for APIP (leadership in governance, risk and control)



- Memperkuat kapabilitas auditor untuk menjadi *trusted advisor*
- Mendorong semakin efektifnya *first line* dan *second line* dalam memperkuat pengendalian intern organisasi
- Meningkatkan kemampuan untuk melakukan CACM
- Mendorong penguatan pencegahan fraud pada setiap level organisasi
- Mendorong semakin baiknya pelayanan organisasi kepada masyarakat



SIKAP PEMIMPIN DALAM MENGHADAPI ISU COVID-19 & DISRUPSI YANG MENGIKUTINYA



KEPEMIMPINAN APIP DALAM ERA PANDEMI COVID 19 & DISRUPSI YANG MENGIKUTINYA

BERSINERGI DENGAN APIP LAIN
dalam Pelaksanaan Tugas Audit di
Era Pandemi COVID 19

**MEMANFAATKAN TEKNOLOGI
INFORMASI & KOMUNIKASI**
dalam pelaksanaan *remote audit*

MENDORONG AUDITOR
untuk Memutakhirkkan Kemampuan
Audit dan Analisisnya

MENDORONG FIRST LINERS
untuk mengembangkan Manajemen
Risiko pada Setiap Penugasan

MENDORONG SECOND LINERS
(Unit Kepatuhan Intern) untuk ikut
Memberikan Keyakinan
terselenggaranya dengan baik SOP
dan Manajemen Risiko

**TERCAPAINYA
TUJUAN
ORGANISASI**

MENDORONG AUDITOR MEMUTAKHIRKAN KEMAMPUAN AUDIT & ANALISISNYA





SINERGI DENGAN APIP & LEMBAGA LAIN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN DI ERA PANDEMI COVID-19

- a. Penyamaan Persepsi terhadap Kebijakan-Kebijakan yang diterbitkan pada Era Pandemi Covid-19
- b. Kolaborasi Penyusunan/Revisi Standar Pengawasan Intern
- c. *Sharing Experience* Penerapan Metode Pengawasan baru di Era Pandemi Covid-19
- d. *Sharing* Informasi/data yang dibutuhkan dan bersifat Lintas K/L
- e. *Joint Audit* terhadap Obyek Pengawasan Lintas K/L

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI DALAM PELAKSANAAN AUDIT



TERIMA KASIH

DR BINSAR H SIMANJUNTAK AK MBA CA CPMA Cipsas QIA QGIA